

Handout: **KOMUNIKASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN (KSP)**  
**PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN** <sup>1</sup>  
*(Environmental Development)*

*Oleh: Kamaruddin Hasan*<sup>2</sup>

Lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan mulai dikenal di kalangan pemerintah di dunia ini pada tahun 1972, dan sejak itu mulai dirintis berbagai langkah mengembangkan pola pembangunan yang tidak merusak lingkungan (Emil, 1990). Konferensi PBB untuk lingkungan hidup Juni 1972 di Stockholm, Swedia, merupakan titik awal berkembangnya paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indonesia baru secara eksplisit memuatkan pertimbangan lingkungan dalam pembangunan sejak Repelita II (1979-1983). Dan sejak itu diusahakan berbagai alat kebijakan pembangunan yang mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif pembangunan terhadap lingkungan.

Dalam buku “Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1992 : 20 tahun Setelah Stockholm” , yang disunting oleh Surna dan Harry (1992:7-9) diuraikan tentang perkembangan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan (*environmental development*). Konferensi Stockholm dengan slogannya *Hanya Satu Bumi*, ingin mencoba membangkitkan perhatian negara-negara di dunia akan permasalahan lingkungan serta mencoba mengidentifikasi aspek-aspek yang sebaiknya dipecahkan melalui kerjasama dan perjanjian internasional. Dari 109 rekomendasi yang dihasilkan konferensi Stockholm, kesemuanya itu dapat dikelompokkan dalam lima bidang utama : permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Deklarasi Stockholm yang telah disepakati PBB mencatat perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia. Salah satu kunci keberhasilan Konferensi adalah terbentuknya Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) pada tahun 1972, suatu badan PBB yang mengkoordinasikan kegiatan lingkungan internasional.

Konsep lingkungan manusia yang diperkenalkan UNEP adalah konsep yang teramat penting. Berbeda dengan karakteristik lingkungan alam, konsep lingkungan ini lebih sesuai dengan bagi negara berkembang. Konsep ini menekankan perlunya langkah-langkah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar umat manusia di negara berkembang. Slogan *Hanya Satu Bumi* juga menekan pentingnya keterkaitan antara makhluk di muka bumi.

Pada konferensi Stockholm ini pulalah mulai diupayakan melibatkan pemerintah di seluruh dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi penyelamatan planet bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan prioritas dan prinsip-prinsip lingkungan. Selain itu, dipromosikan juga perjanjian dan konferensi internasional yang selanjutnya perlu

---

<sup>1</sup> Diambil dari berbagai sumber

<sup>2</sup> Dosen prodi ilmu komunikasi Fisip Unimal

diadakan, untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang pertama kali diangkat di Stockholm.

Berkaitan dengan semua masalah itu, tidaklah mengherankan jika konferensi ini mengkaji kembali pola pembangunan konvensional yang merusak bumi, yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan demografi di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta timpangnya tatanan ekonomi internasional. Sepuluh tahun setelah Stockholm, 105 negara menghadiri konferensi di Nairobi, Kenya. Konferensi ini merupakan perwujudan dari semakin meningkatnya kesadaran lingkungan global dan semakin diakui pentingnya pembangunan ekonomi. Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian pada konferensi tersebut dan sekarang masih tetap relevan adalah : (1) masalah atmosfer, seperti menurunnya kualitas udara di permukiman kota; (2) pencemaran lautan oleh minyak bumi dan substansi lainnya; (3) pencemaran air permukaan dan air tanah; dan (4) degradasi biota daratan dan tata lingkungan biologis.

Perlunya pengelolaan lingkungan dan analisis dampak lingkungan serta pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga merupakan pokok bahasan penting pada Deklarasi Nairobi. Sebagai peringatan ulang tahun ke-duapuluh Konferensi Stockholm yang jatuh pada tahun 1992, telah berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Konferensi ini secara formal disebut Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB (UNCED) atau lebih dikenal sebagai KTT Bumi ini, digagas pertama kalinya oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987. Maurice Strong, Sekretaris Jenderal Konferensi Stockholm dan sekarang Ketua KTT Bumi membedakan antara Konferensi Stockholm tahun 1972 dan KTT Bumi ini. Tujuan mendasar Konferensi Stockholm tahun 1972 adalah untuk memasukkan isu lingkungan dalam agenda internasional. Sedangkan tujuan utama Konferensi Rio tahun 1992 lebih ditekankan pada pengintegrasian lingkungan ke dalam agenda pembangunan, disamping perlunya aspek lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi.

UNCED bermaksud untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi sampai akhir abad ini dan sesudahnya. Secara komprehensif juga terkait dengan isu pembangunan, yaitu laju pertumbuhan penduduk bumi yang meningkat dengan cepat. Pada tahun 1972 penduduk bumi baru 4 milyar jiwa, sekarang lebih dari 5 milyar jiwa dan diperkirakan melampaui 6 milyar jiwa pada tahun 2000 dan 10 milyar jiwa di tahun 2050. UNCED, yang diikuti 180 negara, membahas kebutuhan manusia akan lingkungan hidup yang serasi, lestari, sehat dan produktif. Ini menyangkut isu mengenai perubahan iklim, penipisan lapisan ozon dan pencemaran udara. Selain itu dibahas pula perlindungan terhadap tanah yang berkaitan dengan penggundulan hutan, penggurunan dan hilangnya lapisan tanah yang subur, pelestarian keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran air, perlindungan terhadap pesisir dan lautan, bioteknologi, pencegahan lintas batas ilegal dari limbah berbahaya dan beracun, peningkatan kualitas hidup dan kesehatan manusia. Berbagai hasil yang diharapkan adalah disepakatinya Konvensi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati.

Hasil penting lainnya adalah *Deklarasi Rio* atau *Piagam Bumi*, yang memuat sejumlah prinsip mengenai hak dan tanggungjawab negara terhadap lingkungan.

Semuanya ini menjadi relevan dengan isi Agenda 21, suatu dokumen cetak biru yang memuat rincian rencana tindakan yang perlu diikuti pemerintah, organisasi internasional dan berbagai pihak lain. Secara ringkas, Agenda 21 ditujukan untuk melindungi lingkungan serta merekonsiliasikan pembangunan dan lingkungannya, mulai sekarang sampai abad ke-21 mendatang.

Hal utama yang diperlukan dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah penggunaan sumber daya berkesinambungan, serta bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dapat menghasilkan **dampak negatif** selain **dampak positif**. Berbagai fakta dan pengalaman menunjukkan bahwa dampak negatif pembangunan menyebabkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terlambat atau tidak tercapai. Dalam penyusunan kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, pertimbangan lingkungan menjadi sub sistem yang dimasukkan dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.

Asumsinya, jika pembangunan tidak memperhatikan kualitas lingkungan hidup, maka depresiasi sumber daya alam akan semakin nyata. Oleh karena itu keseimbangan antara lingkungan hidup sosial, lingkungan hidup binaan dan lingkungan hidup alami perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (Surna, 1992). Untuk kondisi di Indonesia, Emil (1990:2) menyatakan bahwa segi-segi lingkungan umumnya belum masuk alur tengah pemikiran ekonomi. Segi-segi lingkungan diperlakukan sebagai faktor ekstern, yang proses internalisasinya belum berjalan secara otomatis dalam proses ekonomi. Karena itu maka proses pembangunan yang sarat pertimbangan ekonomi akan terasa timpang dan memerlukan pemikiran-ulang untuk bisa mencegah dampak negatifnya kepada lingkungan. Salah satu cara agar aspek lingkungan terintegrasi dalam pembangunan ekonomi, yaitu melalui perhitungan ekonomi sumber daya alam atau *natural resources accounting*.

Perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan memperhatikan faktor-faktor seperti perubahan demografi, kebutuhan penduduk, keterbatasan sumber daya, pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterkaitan dan interaksinya satu sama lain. Hal ini memungkinkan untuk dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan seperti :

1. Pengelolaan sumber daya alam;
2. Analisis dampak lingkungan;
3. Penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
4. Pengembangan keanekaragaman hayati;
5. Pengendalian kerusakan lingkungan;
6. Pengembangan kebijakan ekonomi lingkungan;
7. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
8. Pengembangan hukum lingkungan. (Surna, 1992)

Pertambahan penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya masalah antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia harus mengelola dan mengawasi lingkungannya sebaik mungkin, sehingga pembangunan berwawasan lingkungan dapat menunjang kehidupan dan pertumbuhannya. Selanjutnya faktor kualitas penduduk akan mempengaruhi faktor lingkungan, dan sebaliknya faktor lingkungan akan mempengaruhi faktor kualitas penduduk atau istilah lain *interlocking*.

Dalam tulisan Riga Adiwoso (1990) tentang "*Analisis Dampak Sosial : Memperkirakan dan Mencegah Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan Sosial*", dijelaskan bahwa pada tahun 1970-an berkembanglah Social Impact Assessment (SIA) di Amerika yang merupakan hasil perhatian ilmuwan dan praktisi untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan industri dan eksplorasi sumber daya alam. Perhatian ini berkembang karena adanya ketergantungan yang berlebihan pada kriteria-kriteria ekonomi dalam mengukur konsep yang dikenal sebagai "*kualitas manusia*". Hasil nyata dari reaksi terhadap "*economic philistinism*" adalah gerakan indikator sosial dan gerakan ekologi. Kedua gerakan ini berangkat dari asumsi bahwa perspektif ekonomi yang berlebihan terhadap perubahan teknologi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mengesampingkan faktor sosial dan lingkungan yang penting dan juga kurang memperhatikan dampak terhadap manusianya.

Perubahan yang pesat dalam pembangunan industri menimbulkan berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks. Perubahan sosial dirasakan di semua kegiatan kehidupan, baik sebagai dampak positif maupun negatif. Dampak dari orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri sebagai basis pertumbuhan ekonomi, semakin dirasakan dampak negatif terhadap lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Hal ini seiring dengan dampak negatif terhadap pergeseran dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga diperlukan usaha untuk "*pencarian kembali nilai*" dan menekankan usaha mencari "*keadilan sosial*" dan "*kualitas hidup*" serta "*pemerataan*". Kesemua ini mendorong perencanaan pembangunan untuk tidak memisahkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam proses kebijakan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Misalnya, di Amerika, desakan dari gerakan ekologi menghasilkan "*National Environmental Policy Act (NEPA)*" tahun 1969 yang menekankan pada analisis dampak pembangunan terhadap *lingkungan biogeofisik*.

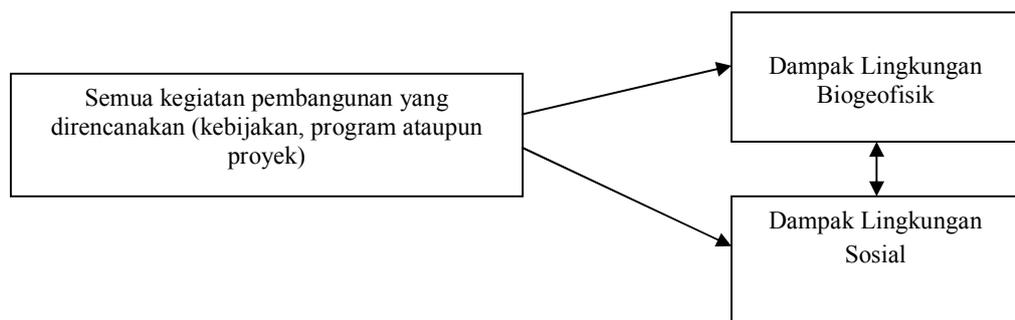
Dalam memberikan perspektif yang komprehensif, analisis lingkungan biogeofisik dari pembangunan, mencoba memperluas batasannya dengan memasukkan aspek sosio ekonomi ke dalamnya, namun terjadi kepincangan karena ilmuwan biogeofisik yang tertarik pada aspek sosial kurang berhasil dalam mengembangkan pengetahuan ilmu-ilmu sosial ke dalam proses analisis dampak lingkungan (EIA). Hal ini telah mendorong ilmuwan untuk mengembangkan "*Social Impact Assessment*" yang menekankan pemisahan aspek sosial, demografi maupun ekonomi dari aspek biogeofisik agar dapat memberikan perhatian yang sepadan. Dalam konteks ini maka paradigma Pembangunan Berpusat pada Rakyat relevan untuk dijadikan landasan analisis dampak lingkungan sosial (Social Impact Assessment).

Walaupun EIA dan SIA lahir atas dasar reaksi terhadap keadaan yang sama dan seringkali menilai obyek yang sama namun dalam perkembangannya makin terlihat sebagai kegiatan yang berbeda. Perbedaan nyata ialah dalam permasalahan yang dihadapi, ragam disiplin yang melakukan, dan perangkat yang digunakan. Misalnya, dalam membangun jalan raya dapat dilakukan studi dampak yang menilai apakah pembangunan akan menyebabkan kebisingan ataupun polusi (dampak biogeofisik). Dinilai juga apakah akan menyebabkan stress psikologis serta relokasi (dampak sosial) dan apakah akan meningkatkan/menurunkan harga tanah (dampak ekonomi).

Permasalahan utama yang hingga kini dibahas di dunia internasional dan belum didapat pemecahannya yang mantap, ialah bagaimana mengintegrasikan data mengenai dampak sosial, ekonomi dan biogeofisik dalam proses pengambilan keputusan. Di pihak lain, subyek penelitian biogeofisik dan sosial berbeda, perangkat analisis dampak sosial tidak dapat dilaksanakan dengan perangkat yang berlaku bagi analisis dampak lingkungan biogeofisik. Juga, analisis dampak sosial tidak perlu selalu dilihat sebagai subset dari kegiatan analisis dampak lingkungan, tetapi sebagai analisis bagi kegiatan pembangunan secara umum (Riga, 1990 :3).

Tujuan utama dari Analisis Dampak Lingkungan Sosial ialah menyajikan informasi mengenai dampak sosial pembangunan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan untuk menangani berbagai konsekuensi suatu kegiatan pembangunan, tetapi juga berbagai alternatif yang dapat diambil dalam pelaksanaan program ataupun proyek agar dapat dampak negatifnya dikurangi. Andal Sosial dapat berarti juga sebagai studi dampak dan konsekuensi sosial dari kegiatan perubahan yang direncanakan, baik perubahan biogeofisik, sosial ataupun ekonomi. Dampak lingkungan sosial dan dampak lingkungan biogeofisik dapat dilihat sebagai dampak langsung dari kegiatan pembangunan, dan antara dampak lingkungan biogeofisik dengan dampak lingkungan sosial saling berkaitan (berkorelasi).

Gambar. Hubungan kegiatan pembangunan yang direncanakan dengan dampak lingkungan biogeofisik dan sosial. Sumber : Modifikasi dari Krawetz dan Adiwoso (1986) dalam Riga (1990 :6)



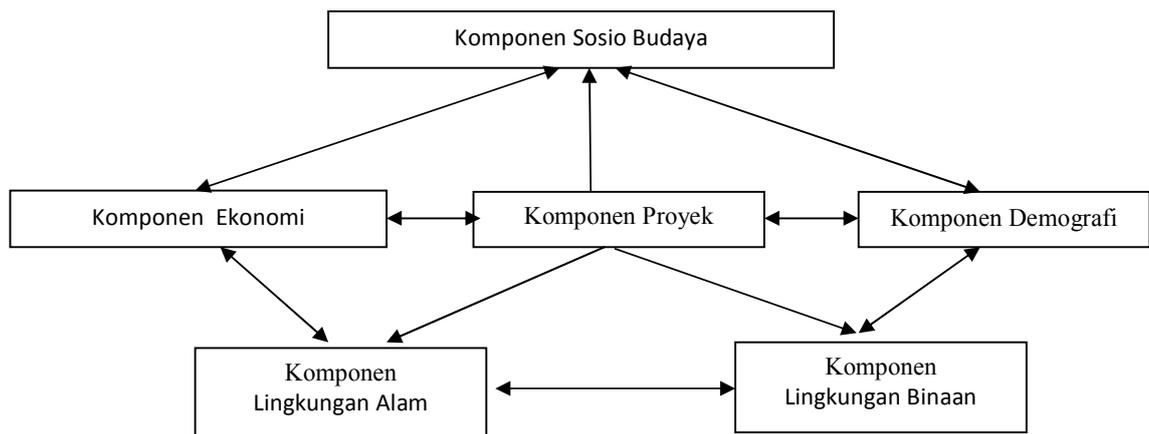
Permasalahan lain yang dihadapi dalam menentukan ruang lingkup analisis dampak lingkungan sosial, ialah bagaimana hubungan antara berbagai aspek yang terkait dalam kegiatan pembangunan, baik dalam tingkat konseptual maupun operasional. Riga (1990 :10) telah mengidentifikasi suatu kerangka pemikiran yang melihat hubungan antara aspek-aspek yang terkait dalam

pembangunan, yang berasal dari gerakan indikator sosial dan berdasarkan konsep kualitas hidup (quality of life) dan kemaslahatan sosial (well being). Ada 6 aspek utama dalam Andal Sosial, yaitu :

- (1) Aspek Sosio Budaya;
- (2) Aspek Demografi;
- (3) Aspek Ekonomi;
- (4) Aspek Lingkungan Binaan;
- (5) Aspek Lingkungan Alam;
- (6) Aspek Proyek.

Hubungan antar aspek tersebut digambarkan sebagai berikut:

**Gambar . Hubungan antar komponen dalam Amdal Sosial**



Dari 6 aspek/ komponen yang berkaitan, dalam Andal sosial, komponen intinya adalah 3 komponen, yaitu sosio budaya, demografi, dan ekonomi. Untuk dampak sosial dilihat hubungan intra-komponen inti dan hubungan inter komponen inti dengan komponen proyek, lingkungan alam dan lingkungan binaan, Dengan demikian, suatu Andal Sosial baru dianggap lengkap, bila dapat menyajikan informasi mengenai dampak yang diperkirakan yang menyangkut komponen inti tersebut. Informasi mengenai subkomponen tidak hanya yang bersifat statistik. Analisis kualitatif diperlukan dengan mengidentifikasi : pertama, kesempatan dan masalah sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat suatu kegiatan pembangunan, kebijakan, program ataupun proyek, dan kedua, informasi tentang masyarakat mana yang akan terkena dampak. Riga (1990) mengidentifikasi subkomponen yang dianggap perlu dipertimbangkan dalam Andal Sosial dengan mengacu kepada faktor-faktor yang diusulkan pada temu kaji Andal Sosial di Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Kantor Menteri Lingkungan Hidup) tahun 1986, sebagai berikut :

### **1. Komponen Sosio-Budaya :**

- a. Organisasi budaya dan cara hidup sehari-hari yang menyangkut jenis pranata yang ada dalam suatu komunitas, adat-istiadat, norma dan tata-cara, dan pengelompokkan masyarakat. Dilihat juga pola interaksi antar-subkomponen.
- b. Nilai, sikap dan persepsi : baik antar-kelompok maupun mengenai kegiatan yang direncanakan.
- c. Distribusi kekuasaan dan kehidupan politik : pembagian kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu serta pergeseran kekuasaan dalam masyarakat.
- d. Struktur stratifikasi : berbagai stratifikasi menurut berbagai pranata yang ada, misalnya struktur stratifikasi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan agama dalam suatu masyarakat.
- e. Peranan dalam masyarakat, yang menyangkut juga masalah kesempatan peranan dan tingkat spesialisasi yang ada dan diperlukan.
- f. Integrasi atau keserasian : melihat proses sosial yang dapat memelihara, mencegah atau merusak keserasian.
- g. Hubungan dengan daerah, atau lokasi lainnya : keterkaitan yang ada antara masyarakat, dimana kegiatan pembangunan akan diadakan, dengan masyarakat di luar lokasi tersebut, baik hubungan yang bersifat sosial, politik maupun ekonomi.
- h. Pranata dan fungsinya dalam masyarakat yang erat hubungannya dengan subkomponen organisasi budaya dan cara hidup sehari-hari. Dilihat jenis dan jaringan hubungan dalam setiap pranata.
- i. Pengalaman dengan perubahan sosial : tingkat kesanggupan masyarakat menangani perubahan yang datang dari luar serta cara-cara penanganan perubahan.
- j. Masalah Sosial : jenis-jenis masalah sosial yang ada serta penanganannya di masyarakat.
- k. Kesehatan lingkungan yang dipengaruhi oleh ciri kependudukan, cara hidup, penggunaan sumber daya, keadaan biofisik serta risiko suatu proyek.
- l. Penggunaan sumber daya (produksi-distribusi-pola konsumsi). Teknologi yang digunakan dalam suatu kegiatan pembangunan dapat merubah pola konsumsi setempat yang selanjutnya merubah cara hidup sehari-hari maupun penggunaan lahan/tanah.
- m. Lingkungan binaan : perubahan pada lingkungan binaan akan membawa dampak perubahan persepsi, orientasi, rasa kenyamanan, dan interaksi sosial.
- n. Demografi : peningkatan mobilitas penduduk yang dapat memberi dampak perubahan terhadap struktur dan stratifikasi sosial dalam masyarakat dan terutama terhadap hubungan antara pendatang dan penduduk asli.

## 2. *Komponen Kependudukan*

- a. Jumlah Penduduk, dengan asumsi semakin besar jumlah penduduk dan semakin banyak diferensiasi kerja yang ada di suatu lokasi kegiatan pembangunan, semakin kecil intensitas dampak sosial yang diperkirakan, karena proyek dapat menggunakan tenaga kerja setempat.
- b. Kepadatan penduduk dan komposisi penduduk di lokasi, untuk memperkirakan besaran dampak, stress ataupun konflik, dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.
- c. Jarak lokasi dari pusat daerah atau kota metropolitan, dengan asumsi bahwa kota besar lebih mudah dapat menyerap dampak sosial suatu kegiatan.
- d. Keanekaragaman penduduk di lokasi, dengan asumsi bahwa semakin beraneka ragam penduduk di suatu lokasi, semakin menjadi kurang menyolok kehadiran pendatang, karenanya perbedaan pendatang dan penduduk asli berkurang. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa semakin beranekaragam semakin tinggi toleransi pada perubahan.
- e. Pola perubahan penduduk, untuk memperkirakan tenaga kerja yang tersedia bagi kegiatan pembangunan yang direncanakan.

## 3. *Komponen Ekonomi*

- a. Perubahan Pendapatan, yang akan menyebabkan perubahan daya beli penduduk sehingga merubah cara hidup sehari-hari.
- b. Daya serap dan komposisi tenaga kerja diberbagai sektor ekonomi,
- b. yang mempengaruhi struktur stratifikasi serta kehidupan masyarakat setempat.
- c. Perpajakan, yang menentukan gaya hidup sehari-hari dari masyarakat dan perubahan karena kegiatan pembangunan pada sistem atau pelaksanaan perpajakan akan membawa dampak sosial
- d. Pola kegiatan di setiap sektor ekonomi, yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, dan mempengaruhi keadaan sosial dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, maka Andal Sosial bersifat kompleks, sehingga memerlukan integrasi analisis dari beraneka ragam disiplin, analisis perlu dilakukan oleh tim bukan perorangan, dengan sifat analisis "*interdisipliner*", "*multidisipliner*", atau "*cross disipliner*". Tahapan studi Andal Sosial serupa namun tidak perlu sama dengan tahapan yang ditemui dalam analisis dampak lingkungan biogeofisik. Umumnya ada 4 tahapan utama yang dilakukan :

- a. *Penyajian informasi lingkungan sosial (PIL)*, memberikan informasi mengenai keadaan lingkungan sosial sebelum kegiatan yang direncanakan dilakukan, kecenderungan dan masalah yang ada di dalam masyarakat tersebut.
- b. *Proyeksi* mengenai perubahan yang mungkin terjadi dengan memperhatikan distribusi dari perubahan yang diperkirakan dalam masyarakat.

- c. *Penilaian (assessment)*, melakukan penilaian mengenai besaran dan pentingnya dampak yang diperkirakan.
- d. *Evaluasi*, melakukan penilaian mengenai kemungkinan diterima dan diabsorpsinya dampak perubahan oleh masyarakat setempat.

### **Kualitas Lingkungan Hidup Sosial**

Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup sosial dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta dapat teratasinya depresiasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif.

Perlunya menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup sosial pada nasional maupun tingkat regional (analisis spasial), didasarkan atas pertanyaan yang mendasar : “Apakah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, cenderung memperbaiki, memperburuk atau tidak memberi pengaruh yang berarti atas kualitas sumber daya manusia, masalah kemiskinan, dampak lingkungan sosial dan kualitas hidup sosial?”. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas hidup dan berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif.

Gore (1984) mengemukakan bahwa ada tiga masalah kebijakan yang umum terjadi di negara-negara berkembang, yaitu: (1) ketimpangan regional dalam pembangunan; (2) pesatnya perkembangan ibukota negara; dan (3) kesenjangan kota dan desa. Karena itu, tujuan pembangunan regional, diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antar regional dan antar desa dan kota, serta menahan pertumbuhan ibukota negara. Untuk itu, berbagai indikator dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan regional dan kesenjangan desa - kota, seperti : pendapatan per kapita, kesempatan kerja, fasilitas sosial atau infrastruktur. Asumsi yang digunakan yaitu pola spasial adalah fakta sosial dan masalah ekonomi. Dengan demikian hubungan antara ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup sosial dalam konteks spasial di suatu wilayah, berkaitan dengan pandangan tentang adanya hubungan antara permasalahan ekonomi dengan fakta sosial yang dicerminkan melalui pola-pola spasial.

Dalam konteks pembangunan, indikator kemajuan pembangunan yang umum digunakan yaitu indikator-indikator ekonomi, seperti : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), GNP/ PNB per kapita, inflasi, dan sebagainya. Penyempurnaan

penggunaan indikator ekonomi, seperti GNP/ PNB per kapita sebagai ukuran pembangunan, yaitu ditambahkan dengan indikator yang menggambarkan pemerataan pembagian pendapatan dan tingkat ketimpangan sebaran pendapatan. Jika didasarkan atas indikator-indikator ekonomi, dapat diketahui seberapa jauh pertumbuhan ekonomi yang pesat di suatu wilayah pembangunan diikuti semakin tingginya pemerataan pembangunan yang dilihat dari pemerataan pembagian pendapatan maupun semakin rendahnya tingkat ketimpangan sebaran pendapatan. Dengan semakin berkembangnya indikator-indikator pembangunan sosial, yang lebih menekankan kepada aspek kualitas hidup manusia, maka banyak kritik ditujukan kepada indikator-indikator ekonomi tersebut diatas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya inkonsistensi antara hasil pembangunan yang dicapai menurut indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita; dengan penurunan jumlah penduduk miskin atau peningkatan kualitas hidup penduduk.

=====